



EVALUASI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP NEGERI 2 BANYUKE HULU

Oleh

Julia Larasanti¹, Usman Radiana²

Universitas Tanjungpura, Pontianak^{1 2}

julialandak123@gmail.com, radianausman@gmail.com

Diterima 24 Oktober 2023, direvisi 10 Juni 2024, diterbitkan 28 Februari 2024

Abstract

Quality of education is a major concern in many societies around the world. In the highly competitive education sector, the success of educational institutions depends on the quality of education. Education quality assurance is a systematic, integrated, and sustainable mechanism that ensures the entire process of organizing education meets quality standards. Quality assurance in basic education aims at the quality of education according to national education standards. This study aims to clearly describe quality assurance at the basic education level, especially junior secondary schools and equivalent. With the implementation of educational quality assurance, it is hoped that basic education can be properly implemented and evaluated.

Keywords: *Education Quality Assurance, Basic Education, National Education Standards*

Abstrak

Kualitas pendidikan merupakan perhatian utama di banyak masyarakat di seluruh dunia. Dalam sektor pendidikan yang sangat kompetitif, keberhasilan lembaga pendidikan bergantung pada kualitas pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan merupakan mekanisme sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang menjamin seluruh proses penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar mutu. Penjaminan mutu pendidikan dasar bertujuan pada mutu pendidikan sesuai standar nasional pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas penjaminan mutu pada jenjang pendidikan dasar khususnya sekolah menengah pertama dan sederajat. Dengan dilaksanakannya penjaminan mutu pendidikan diharapkan pendidikan dasar dapat dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik.

Kata Kunci : Evaluasi, Penjaminan Mutu, Pendidikan Menengah

I. PENDAHULUAN

Pendidikan dasar mencakup sembilan tahun masa pendidikan, mencakup enam tahun tahap pendidikan

dasar, diikuti oleh tiga tahun tahap pendidikan menengah, yang dapat mencakup Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau alternatif yang setara, serta

Sekolah Menengah Atas (SMA) atau alternatif yang setara.. Secara terminologis, pendidikan dasar merujuk pada tahap pendidikan terendah dalam sistem pendidikan nasional, yaitu SD. Dalam sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, hal ini diuraikan sebagai berikut:

- a) Pendidikan dasar mencakup tahap pendidikan yang menjadi landasan bagi pendidikan menengah.
- b) Pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Ibtidaiyah (MI), atau jenis pendidikan yang serupa, bersama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk pendidikan yang setara.
- c) Kedepannya, regulasi pemerintah akan merinci ketentuan yang terkait dengan pendidikan dasar, sebagaimana disebutkan dalam bagian (1) dan (2). Selain itu, Penjelasan pada Pasal 17 ayat (2) dengan tegas memberikan penjelasan bahwa. Pendidikan yang setara dengan tingkat SD/MI mencakup inisiatif seperti program Paket B yang diimplementasikan melalui jalur pendidikan nonformal. Sesuai dengan ketentuan UU No. 2 tahun 1989, pendidikan dasar bertujuan untuk menginstil sikap dan memberikan landasan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi syarat masuk ke jenjang pendidikan menengah atas.

Beberapa pemikiran tentang gagasan mutu dalam buku 'Manajemen Mutu Pendidikan menurut para pakar yang disajikan oleh Abdul Hadis dan Nurhayati B, mencakup:

- a. Menurut pendapat Crosby (1979: 58), mutu merujuk pada tingkat kesesuaian suatu produk dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam

konteks ini, mutu berarti produk tersebut menyusul standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, mencakup segala aspek mulai dari bahan mentah, proses manufaktur, hingga produk akhirnya.

- b. Menurut Edward Sallis dalam karyanya yang berjudul "Total Quality Management in Education," konsep mutu dapat dihubungkan erat dengan semangat dan citra diri. Mutu menjadi tujuan utama bagi setiap organisasi, dan menjaga serta meningkatkannya merupakan kewajiban yang sangat penting. Namun, bagi sebagian orang, mutu seringkali menjadi sesuatu yang tampak abstrak. Mutu dianggap sulit untuk diartikan dan diukur dengan pasti. Terkadang, pandangan tentang mutu bisa berbeda antara satu individu dengan yang lainnya. Karena alasan tersebut, tak mengherankan jika dua ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai cara menciptakan lembaga yang unggul.
- c. Menurut Feigenbaum (1986:7), mutu dapat didefinisikan sebagai tingkat kepuasan pelanggan. Mutu suatu produk diukur oleh sejauh mana produk tersebut mampu memenuhi harapan konsumen, artinya sejauh mana hasilnya bisa memenuhi ekspektasi pelanggan dengan baik sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari produk yang diterima. Dengan kata lain, mutu produk tercermin dari tingkat kepuasan yang dapat dicapai oleh konsumen sesuai dengan harapan mereka

terhadap produk yang mereka terima.

- d. Menurut Joseph Juran, mutu adalah kemampuan untuk menggunakan atau mutu adalah kesesuaian untuk digunakan. Dapat dipahami bahwa mutu adalah kesesuaian atau kenyamanan suatu barang yang digunakan oleh seseorang. Selain itu, produk yang bermutu juga ditandai dengan daya tahan, kehandalan, dan jaminan penggunaan.
- e. W. Edward Deming mengartikan mutu sebagai "kemampuan produk untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pasar atau konsumen." Dengan kata lain, produk dapat dikatakan memiliki mutu jika dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen, serta memberikan kepuasan kepada pelanggan terhadap produk tersebut sesuai dengan harapan mereka.

Dalam usaha untuk mendefinisikan mutu, berbagai ahli manajemen telah mengemukakan sudut pandang yang berbeda. Meskipun definisi-definisi ini mungkin tidak sepenuhnya diterima secara universal, terdapat beberapa titik persamaan yang dapat dicatat, di antaranya:

- a) Upaya untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan adalah bagian dari konsep mutu.
- b) Mutu mencakup produk, layanan, individu, proses, serta faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas.
- c) Mutu merupakan kondisi yang dinamis dan selalu mengalami perkembangan.

Dalam ranah pendidikan, mutu diasumsikan sebagai suatu program

atau hasil pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi harapan peserta didik berdasarkan kebutuhan dan perkembangan masyarakat atau dunia kerja. Menurut Aminatul Zahroh, mutu pendidikan merujuk pada kapabilitas lembaga pendidikan dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya pendidikan guna meningkatkan potensi belajar peserta didik seoptimal mungkin.

Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang Marus Suti, pendidikan bermutu mencakup pencapaian keunggulan dalam manajemen pendidikan yang efektif dan efisien., yang berdampak positif pada pencapaian prestasi akademik dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler, serta memastikan keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu.

Dengan perspektif ini, mutu pendidikan dapat dijelaskan sebagai keunggulan sistem pendidikan dan kemampuan yang efektif dalam mengelola dan memproses input pendidikan sehingga mencapai hasil pembelajaran yang unggul dan memenuhi harapan peserta didik.

Sistem penjaminan kualitas di pendidikan dasar dan menengah, yang juga sering disebut sebagai penjaminan kualitas pendidikan, merupakan landasan penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pendidikan untuk mencapai standar mutu pendidikan yang berlaku di tingkat nasional. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yakni Sistem Penjaminan Kualitas Internal (SPKI) dan Sistem Penjaminan Kualitas Eksternal (SPKE).

SPMI, yang merupakan komponen internal, berjalan di bawah naungan satuan pendidikan dan melibatkan berbagai divisi yang terdapat dalam

lingkup institusi tersebut. Sebaliknya, SPME adalah elemen eksternal yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi akreditasi, dan badan standar lainnya yang beroperasi di luar lembaga pendidikan.

Kesuksesan dalam memastikan kualitas pendidikan bergantung pada pembentukan budaya mutu yang mengakar di seluruh elemen lingkungan pendidikan. Semua pemangku kepentingan perlu bersama-sama bertanggung jawab untuk meningkatkan dan memelihara kualitas pendidikan. Sasaran utama dari penjaminan mutu pendidikan adalah meningkatkan standar pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan dan memverifikasi kesesuaian mereka dengan standar nasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan, Badan Akreditasi Nasional memiliki peran penting sebagai lembaga independen yang bekerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai evaluator, tugas mereka adalah memverifikasi sekolah negeri dan swasta untuk memeriksa sejauh mana mereka mematuhi standar pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting bagi evaluator pendidikan untuk menjalani pelatihan khusus yang mencakup etika profesional dalam pendidikan, kemampuan membangun hubungan yang baik antara komponen internal dan eksternal lembaga pendidikan, serta menjaga hubungan yang positif antara pemerintah dan lembaga pendidikan. Kesuksesan dalam usaha penjaminan mutu pendidikan akan tercapai jika prosesnya dijalankan secara profesional dan akurat.

II. PEMBAHASAN

2.1. Standar Mutu Pendidikan

Dalam lingkup nasional, acuan untuk mutu pendidikan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang mencakup hal-hal berikut ini:

- a. Standar Kompetensi Lulusan mencerminkan persyaratan yang menggambarkan kualifikasi yang diharapkan dari individu yang menyelesaikan pendidikan, melibatkan aspek sikap, pengetahuan, dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh mereka.
- b. Standar Isi mencakup rekomendasi mengenai cakupan materi yang perlu disampaikan dan tingkat kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kualifikasi lulusan pada jenjang dan jenis pelatihan tertentu.
- c. Pedoman Pelaksanaan mengacu pada ketentuan yang mengatur strategi pelaksanaan pembelajaran di unit pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- d. Kriteria Penilaian Pendidikan merujuk pada pedoman yang mencakup metode, prosedur, serta alat penilaian hasil pembelajaran peserta didik.
- e. Ketentuan Staf Pendidikan merinci persyaratan pendidikan formal, kesehatan mental, serta kualifikasi yang relevan dengan jabatan yang diemban.
- f. Standar Sarana dan Prasarana merujuk pada ketentuan yang menetapkan kebutuhan akan fasilitas dan kondisi lingkungan yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar. Hal ini mencakup ruang kelas, fasilitas olahraga, perpustakaan, laboratorium, fasilitas teknologi informasi, dan sumber daya lain yang mendukung proses pendidikan

- g. Pedoman Pengelolaan upaya mendekati upaya mengorganisir, menjalankan, dan mengawasi aktivitas-aktivitas dalam sistem pendidikan yang mencakup wilayah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Ini memerlukan perencanaan yang matang dan proses evaluasi yang berkelanjutan.
- h. Standar Pendanaan menguraikan komponen biaya operasional dan tingkat pembiayaan yang berlaku dalam satu periode tahunan untuk unit pendidikan.

2.2. Pemetaan Mutu

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di dalam suatu lembaga pendidikan, diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki kecakapan, ketekunan, dan kapabilitas. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam konteks sekolah sangat penting dalam menyelenggarakan pendidikan berkualitas bagi semua siswa. Kepala sekolah yang diakui kredibilitasnya diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai mentor dan menjadi teladan, dan menginspirasi staf pengajar dan personel pendidikan lainnya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah.

Mengingat situasi tersebut, program pengembangan ketrampilan kepala sekolah harus merangkum isu-isu seperti "EDS" (Efektifitas Diri sebagai Pemimpin Sekolah), yang merupakan bagian penting dari kompetensi manajemen yang perlu dikuasai oleh kepala sekolah untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam konteks sekolah.

Penetapan standar mutu di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu didasarkan pada komponen dari delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan melibatkan representatif dari unit administrasi sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Setelah penetapan standar mutu, langkah berikutnya melibatkan penilaian mutu dengan menggunakan hasil Evaluasi Diri Sekolah (EDS) (Efektifitas Diri sebagai Pemimpin Sekolah) sebagai panduan dan mencatat mutunya pada delapan SNP. Pemetaan kualitas pendidikan ini didukung oleh bukti nyata yang memberikan gambaran yang sangat deskriptif mengenai mutu sekolah. Pernyataan mengenai mutu sekolah ini menjadi landasan untuk merancang berbagai program dan upaya peningkatan yang terdokumentasikan dalam RKJM/RKT, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolah tersebut.

Pengelolaan data dalam upaya peningkatan mutu pendidikan memerlukan ketelitian yang ekstra, analisis yang mendalam, serta aksesibilitas data yang mudah bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan, keputusan, alokasi sumber daya, dan pembentukan budaya peningkatan mutu merupakan komponen kunci. Lembaga dan organisasi yang terlibat dalam sistem penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan bertanggung jawab atas pengumpulan dan manajemen data penjaminan mutu pendidikan, dan mereka memiliki peran yang krusial dalam memastikan bahwa data-data tersebut bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara efektif.

Kerjasama yang berhasil dan berlanjut di antara berbagai entitas terlibat dalam sistem penjaminan dan perbaikan kualitas pendidikan

memiliki implikasi positif terhadap peningkatan standar mutu pendidikan. Namun, perlu diimbangi dengan inisiatif pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk mencapai hasil yang optimal.

2.3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu

Standar pendidikan ditetapkan dengan tujuan mengevaluasi serta mengukur prestasi standar yang telah ditetapkan dalam ranah pendidikan. Di Indonesia, regulasi pemerintah mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan. Pemerintah telah melangkah jauh untuk mencapai visi dan misi pendidikan nasional dengan langkah-langkah strategis jangka panjang. Ini melibatkan penetapan standar pendidikan yang komprehensif, pendefinisian sistem pendidikan yang tegas untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai lembaga yang terkait dalam upaya pembinaan mutu.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses manajemen, seperti yang terlihat dalam upaya untuk meningkatkan kinerja para pendidik. Rencana kinerja guru berperan sebagai peta arah yang merinci langkah-langkah untuk mencapai visi dan misi sekolah pada periode yang akan datang. Ini menjadi unsur inti dalam pengelolaan yang menentukan transisi seorang guru dari jabatan yang dimilikinya saat ini menuju jabatan yang diinginkan pada periode yang akan datang.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2016, aspek mutu dalam penyelenggaraan pendidikan minimal mencakup pertanggungjawaban pelaksana dan penetapan batas waktu, periode

waktu, dan ukuran pencapaian. Saat merencanakan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), SMP Negeri 2 Banyuke Hulu melakukan berbagai persiapan, termasuk pembentukan tim perancang, perencanaan jadwal, studi perbandingan, workshop unit kerja, dan pelatihan internal. Dokumen RKJM/RKT ini didasarkan pada hasil evaluasi mutu dari Efektivitas Diri sebagai Pemimpin Sekolah (EDS), visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, dan kebijakan mutu sekolah. Isinya mencakup program-program dan kegiatan yang memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), tujuan pendidikan, indikator pencapaian, bukti pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, serta sumber pendanaan yang dibutuhkan. RKJM/RKT ini melalui persetujuan komite sekolah, setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah, rencana strategis ini kemudian disampaikan kepada seluruh divisi sekolah melalui pertemuan langsung serta distribusi dokumen cetak.

2.4. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Realisasi pemenuhan mutu di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu merupakan hasil dari implementasi program-program dan tindakan yang terdokumentasi dalam RKJM/RKT dan ditangani oleh berbagai unit kerja sesuai dengan peran masing-masing. Keterlibatan dan keseriusan semua anggota sekolah sangat penting dalam menjalankan pemenuhan mutu ini secara efektif. SMP Negeri 2 Banyuke Hulu telah memastikan aspek mutu dengan melalui serangkaian program dan kegiatan yang terefleksi dalam RKJM/RKT mereka. Ini termasuk peningkatan berbagai elemen seperti kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, pencapaian

kompetensi siswa, sumber daya manusia, fasilitas, manajemen, alokasi anggaran, dan evaluasi pendidikan. Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Umum Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2016, prestasi mutu di satuan pendidikan menjadi manifestasi nyata dari pelaksanaan semua program dan upaya yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan mutu pengajaran. Partisipasi yang aktif dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam ranah pendidikan memiliki peran yang sangat penting.

Implementasi program dan kegiatan untuk memenuhi kedelapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu dibebankan kepada setiap divisi sesuai dengan cakupan tugas dan kewajiban yang ada. Divisi-divisi ini secara proaktif terlibat dalam persiapan dan perencanaan detail yang diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program tersebut. Keterlibatan seluruh stakeholders dalam ranah pendidikan, sebagaimana yang diuraikan dalam panduan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2016, menjadi suatu imperatif yang tidak bisa diabaikan.

Informasi yang ada mengindikasikan bahwa kolaborasi semua unsur di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu dalam menjalankan inisiatif peningkatan mutu pendidikan telah berjalan dengan sangat positif. Setiap anggota komunitas sekolah secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Para tenaga pengajar yang menempati posisi dalam institusi pendidikan telah dengan sungguh-sungguh mendukung langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Mereka secara konsisten mempraktikkan

keterlibatan aktif, mengambil peran dalam setiap pertemuan, memberikan masukan yang berarti, serta memikul tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan kepada mereka.

2.5 Evaluasi Pemenuhan Mutu

Tahap akhir melibatkan evaluasi pemenuhan mutu dan penilaian kinerja SMP Negeri 2 Banyuke Hulu melalui Efektivitas Diri sebagai Pemimpin Sekolah (EDS) guna memastikan pelaksanaan kedelapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah dijalankan secara efektif dan sukses. Evaluasi ini mencakup peninjauan hasil implementasi serta melibatkan staf evaluasi yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tanggung jawabnya untuk melakukan penilaian terhadap status pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Laporan hasil evaluasi ini akan diberitahukan kepada kepala sekolah atau diumumkan dalam pertemuan manajemen sekolah. Proses evaluasi juga melibatkan pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, serta penyusunan rencana perbaikan.

Sebagai bagian dari proses evaluasi kepatuhan mutu, kami juga mengadakan diskusi untuk memberikan kesempatan kepada staf yang terlibat dalam pelaksanaan program untuk menyampaikan keluhan mereka. Diskusi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dirasakan oleh individu dan kelompok, selain itu, penilaian juga mempertimbangkan aspek-aspek yang berkontribusi pada pelaksanaan program. Penilaian ini dilakukan secara teratur, yakni dalam interval waktu yang telah ditentukan, seperti bulanan, perempat tahun, per semester, atau tahunan, sesuai

dengan kebutuhan dan perencanaan sekolah.

III. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa langkah-langkah yang telah diimplementasikan oleh SMP Negeri 2 Banyuke Hulu dalam rangka pemetaan mutu, dengan tujuan untuk meningkatkan performa sekolah secara keseluruhan, telah berjalan dengan efektif. Sekolah telah berhasil menjalankan, mengatur kebijakan mutu yang sejalan dengan standar nasional pendidikan, menentukan sasaran mutu, mengidentifikasi indikator kinerja, dan merencanakan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan untuk memantau pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing unit kerja dan memastikan bahwa program-program yang telah ditetapkan berjalan sesuai rencana. Hasil dari laporan evaluasi ini diberitahukan kepada kepala sekolah atau dibicarakan dalam pertemuan manajemen sekolah, sambil mengenali berbagai isu yang muncul selama evaluasi dan mengarahkan rekomendasi perbaikan. Penilaian mutu dan audit yang dilakukan di SMP Negeri 2 Banyuke Hulu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan telah terealisasi dengan efektif. Dalam praktiknya, ini terlihat dalam penilaian formatif yang menekankan aspek evaluasi dari indikator proses, sementara penilaian sumatif lebih menitikberatkan pada evaluasi dari indikator hasil, juga, ketika melaksanakan audit proses dan memastikan ketaatan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadis. (2010) Nurhayati B. Manajemen Mutu Pendidikan. (Bandung: AlfaBeta) hal 84-85.
- Alim Mahmud. Arfan Arsyad. Arwildayanto. (2022). Evaluasi Implementasi SPMI Akademik Di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. *Jurnal Normalita*. Vol. 10 No. 3. Hlm. 252-270. ISSN: 2552-5920.
- Aminatul Zahro. (2014). Total Quality Management Teori & Praktik Manajemen Untuk Mendongkrak Mutu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). 28.
- Ana Andriani. Wakhudin. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Model Pembelajaran Discovery Learning Di Mim Pasir Lor Karanglewes Banyumas. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol. 1 No. 2. pp. 51-63 (November).
- Endah Winarti. Zainal Abidin. (2022). Manajemen Pendidikan Dasar Islam: Konsep Dasar dan Landasan Pengelolaan. *Nidhomiyah : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 03 No. 02:150-162.
- Ketut Bali Sastrawan. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Perencanaan Mutu Strategis. *Jurnal Penjaminan Mutu*. Vol. 5 No. 2. (Agustus).
- Marus Suti. (2011). Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan". *MEDTEK*. Vol. 3 No. 2. (Oktober).
- Marzuki Mahmud. (2012). Manajemen Mutu Perguruan Tinggi (Jakarta: Rajawali Pers). 5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

- Puslitjakdikbud. (2019). Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. Badan Penelitian dan Pengembangan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rohmad Sodiqdan Kir Haryana. (2017). Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Di SMK Negeri 1 Magelang. *Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif*. Edisi XVIII No. 2.
- Ruyatul Hajar. (2017). Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Kinerja Madrasah: Studi di MTs Assurur dan MTs Arrohmah Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*. Vol. 1 No. 1.
- Setiyo. (2021). Peranan Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*. Vol. 11 No. 2. April : 91 – 99.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.